

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN SDM BERBASIS PROGAM
SMART VILLAGE
(Studi di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara)**

(Skripsi)

**Oleh:
EMA ANGGRAINI
NPM 1916021042**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN SDM BERBASIS PROGRAM *SMART VILLAGE* (Studi di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara)

Oleh

EMA ANGGRAINI

Penelitian ini di latarbelakangi oleh sumber daya manusia yang belum memadai dalam penggunaan teknologi digital di Desa Way Lunik, sehingga dibutuhkan penguatan sumber daya manusia yang menguasai teknologi melalui program *smart village*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan masyarakat, desa dan transmigrasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program *smart village*, mengetahui faktor pendorong dan penghambat peran dinas pemberdayaan masyarakat, desa dan transmigrasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program *smart village*.

Jenis metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif melalui teknik pengumpulan data kuesioner dan dokumentasi dengan responden yang berasal dari Desa Way Lunik yang akan diolah dengan cara teknik pengolahan data *editing* dan interpretasi data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis program *smart village* di Desa Way Lunik berada pada taraf 87,56 yang artinya berperan karena dari semua indikator elemen *smart village* menunjukkan hasil yang tinggi dengan rentang 76% - 100% pada tiga elemen yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Tetapi pada *smart community* yaitu khususnya pada indikator komunitas yang mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, aparatur desa belum mampu membuat aplikasi untuk mengembangkan pembangunan potensi desa, sehingga dari ketiga elemen ini masing-masing berperan sebagai indikator terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengan baik akan tetapi masih kurangnya pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program *smart village* tersebut.

Kata Kunci : Peran Dinas PMDT, Pembangunan SDM, Program *Smart Village*

ABSTRACT

ROLE OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT AND TRANSMIGRATION DEPARTMENT IN SMART VILLAGE PROGAM BASED HR DEVELOPMENT (Study in Way Lunik Village South Abung District North Lampung)

By

EMA ANGGRAINI

This research is background by inadequate human resources in the use of digital technology in Way Lunik village, so that it is necessary to strengthen human resources who master technology through the smart village program. The purpose of this study was to determine the role of the village community empowerment and transmigration office in developing human resources through the smart village program, to find out the driving and inhibiting factors of the village community and empowerment and transmigration office in developing human resources through the smart village program. The type of methods used is descriptive analysis through questionnaire data collection techniques and documentation with responden from the village of Way Lunik which will be processed by how to edit data processing techniques and interpretation of data. The results showed that the role of the village community empowerment and transmigration service in smart village program-based human resources development in Way Lunik village was at the level of 87.56 which mean that it played a role because of all the indicators of the elements of the smart village it showed high results with a range of 76% - 100% in three elements, namely smart government, smart community, and smart environment. But in smart communities, namely specifically in community indicators that develop information communication technology, the village apparatus has not been able to make applications to develop village potential development. So that each of these three elements acts as an indicator of the realization of human resource development that is going well but there is still a lack of training and understanding of the community regarding the smart village program.

Keywords: The Role of PMDT Service, HR Development, Smart Village Program

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN SDM BERBASIS PROGAM
SMART VILLAGE
(Studi di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara)**

Oleh

EMA ANGGRAINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN TRANSMIGRASI DALAM
PEMBANGUNAN SDM BERBASIS PROGRAM
SMART VILLAGE (Studi di Desa Way Lunik
Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara)**

Nama Mahasiswa

: Ema Anggraini

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916021042

Program studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

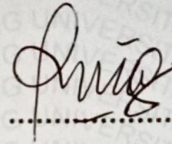
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 19611218 198902 1 001

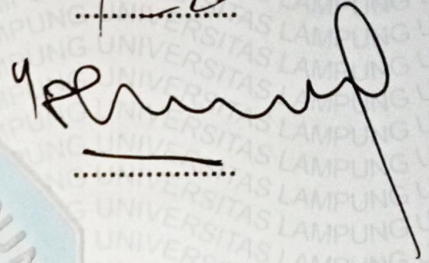
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Penguji : **Dr. Syarifek Makhya.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Mei 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



Ema Anggraini
NPM. 1916021042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ema Anggraini, dilahirkan di Rejomulyo, Lampung Utara pada Tanggal 5 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Suparjo dan Ibu Komsiah. Mempunyai kakak perempuan bernama Heni Makrifah.

Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Dharma Wanita Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 01 Rejomulyo. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 01 Rejomulyo pada Tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Abung Semuli yang selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan) dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis pernah ikut dalam organisasi kampus pada UKM-F yaitu sebagai staf Kajian Strategis FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam) Universitas Lampung periode Tahun 2019/2020.

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari sampai dengan Februari pada Tahun 2022 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2022 penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

MOTTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain ”

(Q.S Al-Insyirah (94) : 6-7)

“ Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil”

(Ahmad Fuadi)

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang”

(Tath Hira Ompu Kori)

“Tidak apa jika jalannya lambat asal tepat daripada hanya berdiam di suatu tempat ujungnya tersesat”

(Ema Anggraini)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamiin Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baiknya pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Dengan ketulusan hati, ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Suparjo dan Ibu Komsiah

serta Kakak & Adikku

Heni Makrifah, Angga Restu dan Cantya Zita Raisya

Terimakasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan, memberikan semangat serta dukungan di setiap perjalananku.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staf dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Dalam Pembangunan SDM Berbasis Progam *Smart Village* (Studi di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara)”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Tanpa adanya doa, bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta kebesaranmu yang selalu memberikan kesehatan, limpahan nikmat sehat, nikmat iman, dan petunjuk yang selalu engkau berikan.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sekaligus sebagai sumbangsih atas kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.

5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih Ibu atas kesedian, kesabaran, dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, saran, ataupun kritik serta ilmu dan pengetahuan baru kepada penulis. Sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Ibu.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya. selaku Dosen Penguji, terimakasih bapak atas kesediannya untuk memberikan kritik, saran, arahan, perhatian, dan masukan yang positif kepada penulis serta nasihat sehingga penulis tetap semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas perhatian, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama masa studi dan penyusunan skripsi.
8. Seluruh jajaran Dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dedikasi, bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
9. Bapak I Wayan Gunawan, S.E dan seluruh Pihak Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terimakasih yang telah memberikan izin dan menerima dengan baik kepada penulis untuk melaksanakan PKL MBKM sekaligus melakukan penelitian. Terimakasih juga atas kesempatannya memberikan pengalaman yang luar biasa di dalam dunia kerja dan banyak memberikan motivasi untuk penulis, semoga seluruh pihak kantor Dinas PMDT senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
10. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Magang Progam MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan penelitian, terimakasih banyak atas pengalaman yang diberikan kepada penulis, terimakasih untuk masukan, kritik, dan motivasi dalam dunia perkuliahan terutama dalam proses penyusunan skripsi.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suparjo dan Ibu Komsiah. Terimakasih untuk Bapakku yang telah memberikan kasih sayang, doa, rezeki serta perjuangan dari

saya kecil hingga mendapatkan gelar sarjana, yang selalu mengantarkan langkah anaknya sampai menempuh perjalanan Perguruan Tinggi, setia mengantar jemput dengan penuh hati tanpa rasa lelah. Untuk Ibuku yang telah melahirkanku terimakasih selalu menjadi sumber kekuatanku atas segala hal, memberikan dukungan, semangat, mengasihi, mencurahkan kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk setiap langkahku. Terimakasih Kedua orang tuaku tercinta atas kerja kerasnya mampu menjadikanku menjadi manusia yang berpendidikan tinggi selalu memberikan dukungan berupa moral dan materil. Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain kata maaf dan terimakasih, semoga setiap langkah perjalananku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk kedua orang tuaku. Serta ilmu yang telah saya peroleh mampu menjadikan manfaat untuk bapak, ibu, keluarga, kerabatan dan sesama. Semoga bapak ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak aamiin.

12. Kepada diriku sendiri yang sering lupa kuperhatikan, terimakasih untuk jiwaku yang selalu kuat dan pantang menyerah dalam berjuang hingga saat ini demi mencapai gelar sarjana. Sering kali tidak ingat bahwa diri sendiri juga patut untuk di apresiasi. Karena setiap manusia hidup dengan porsi sedih dan bahagiannya masing-masing. Terimakasih sudah bersyukur ketika bahagia, dan bangkit ketika terluka. Semangat, *I love myself!*
13. Kepada Kakekku dan Nenekku yang kini telah berada di surga-nya Allah SWT. Terimakasih atas kasih sayang dan semua doa-doa yang telah dipanjatkan untuk cucunya semasa masih hidup. Semoga almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan disisi terbaik Allah SWT amiin.
14. Kepada Kakakku Heni Makrifah dan Angga Restu, terimakasih atas kepeduliannya sebagai seorang kakak yang selalu memberi perhatian, dukungan dan memberikan banyak rezekinya untuk saya. Terimakasih telah menjadi kakak teladan bagi saya semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan kakak-kakakku, selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya.

15. Kepada Cantya Zita Raisya, Adikku sekaligus keponakan kesayanganku terimakasih sudah menjadikan hidup tante penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, selalu menjadi penyemangat buat tante dan keluarga. Semoga selalu diberikan kecerdasan, kesehatan dan dapat menjadi putri yang sholehah berbakti kepada orang tua, semoga kelak segala cita-citanya dapat terwujud, dapat mengangkat derajat kedua orang tua dan selalu menjadi kebanggaan Ayah, Ibu serta keluarga besar amiin yarobballamin. Semangat terus untuk Adikku sayang.
16. Kepada nama yang tidak dapat saya sebutkan sampai saat ini masih kebersamaiku menjadi tempat keluh kesah selama proses penulisan skripsi ini berlangsung sampai dengan bersambung. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, kesabaran, serta menerima segala kekurangan dan kelebihanku. Tetaplah menjadi *partner* terbaik dari versi dirimu sendiri, bukan versi milik orang lain. *You are enough just as you are*. Semoga hal-hal baik selalu berpihak pada hamba-nya yang tak lupa dengan sang pencipta-nya. *Keep fighting!*
17. Kepada seluruh informan kuesioner penelitian termasuk Bang Fitriono, S.H selaku sekretaris sekaligus tim *official smart village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara terimakasih yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
18. Untuk sahabatku Ayu, Erika, Devi, Nanda, Gadis, Afriza, Rido, Avon, terimakasih telah menjadi sahabatku dari awal perkenalan masuk unila sampai saat ini. Sahabat sesama pejuang toga, bersedia memberi bantuan ketika penulis membutuhkan, memberikan banyak kebaikan dan saling membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita selalu dipermudah dalam urusannya masing-masing dan bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan untuk menceritakan kisah suksesnya masing-masing amiin. Semoga sukses selalu!
19. Teman-teman seperjuangan MBKM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 serta teman KKN Desa Bumi Nabung Lampung Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktunya selama masa studi saling memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Sehubungan akhir tulisan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca. Semoga karya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua serta bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doanya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Ema Angraini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Konsep <i>Smart Village</i>	14
2.1.1 Model <i>Smart Village</i>	16
2.1.2 Elemen <i>Smart Village</i>	16
2.1.3 Manfaat <i>Smart Village</i>	31
2.2 Konsep Peran DPMDT	31
2.3 Konsep Pembangunan SDM	35
2.4 Hubungan Peran DPMDT Terhadap Pembangunan SDM	37
2.5 Konsep Pemerintahan Desa	38
2.5.1 Pengertian Desa	39
2.5.2 Fungsi Desa	40
2.6 Kerangka Pikir	41
III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Tipe Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian	44
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Sumber Data	44
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Pengolahan Data	49
3.8 Teknik Analisis Data	49

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Dinas PMDT Provinsi Lampung	51
4.1.1 Sejarah Dinas PMDT Provinsi Lampung	51
4.1.2 Pembangunan SDM Berbasis Progam <i>Smart Village</i>	53
4.1.3 Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi Lampung	54
4.2 Gambaran Umum Desa Way Lunik	55
4.2.1 Sejarah Desa Way Lunik	55
4.2.2 Keadaan Geografis Desa Way Lunik	56
4.2.3 Keadaan Sosial Desa Way Lunik	55
4.2.4 Nama dan Jabatan Pemdes Desa Way Lunik	58
4.2.5 Visi dan Misi Desa Way Lunik	61
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	62
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
4.3.3 Indikator <i>Smart Government</i>	63
4.3.4 Indikator <i>Smart Community</i>	74
4.3.5 Indikator <i>Smart Environment</i>	83
V. SIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Rekap Pengguna <i>Smart Village</i> Lampung.....	4
2.	<i>Smart Village</i> Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara	5
3.	Permasalahan SDM di Desa Way Lunik	8
4.	Tabel Populasi	45
5.	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Way Lunik	56
6.	Tingkat Pendidikan.....	56
7.	Tingkat Pekerjaan.....	58
8.	Tingkat Usia	59
9.	Pegawai Pemerintahan Desa Desa Way Lunik	60
10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	62
11.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
12.	Kemampuan Pemerintah dalam Melakukan Pengelolaan Layanan Administrasi	64
13.	Pemerintah Desa Melibatkan Masyarakat dalam Forum Pengambilan Keputusan	65
14.	Kinerja Pemerintah di Desa Dikatakan <i>Smart</i> dalam Sistem Pelayanan Publik	66
15.	Ketersediaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Diberikan Pemerintah Secara Online	68
16.	Pemerintah Desa Menyediakan Akses Secara Online yang Efektif.....	69
17.	Pemerintah Desa Membuat Progam dan Aplikasi Musrenbang.....	70
18.	Pemerintah Desa Sudah Bisa Menguasai TIK Bagi Desa	74
19.	Pemerintah Desa Adaptif dengan Kecanggihan Teknologi Baru.....	75
20.	Pemerintah Desa Aktif dalam Gotong Royong	76
21.	Adaptif Desa Produktif dalam Kegiatan Pemerintahan Desa.....	78
22.	Komunitas Perangkat Desa dan Masyarakat Membuat Forum Diskusi.....	79
23.	Perangkat Desa dan Masyarakat Membuat Aplikasi Pembangunan Potensi Desa	80
24.	Pemerintah Desa dan Masyarakat Menjaga Lingkungan Melalui TIK	83
25.	Pemerintah Desa Bersama Masyarakat Melakukan Kegiatan AMDAL	84
26.	Pemerintah Desa Bersama Masyarakat Desa Menjaga Kesenian Tradisional.....	85
27.	Pemerintah Desa Bersama Masyarakat Melakukan Kegiatan Pentas Seni	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	42
2. Kantor Desa Way Lunik.....	54
3. Jenis Kelamin	61

DAFTAR SINGKATAN

BANGDES	: Bantuan Pembangunan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPMDT	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
EDC	: <i>Electronic Data Capture</i>
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani
IDM	: Indeks Desa Membangun
IT	: Informasi Teknologi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Musrenbang	: Musrawarah Perencanaan Pembangunan
OTDA	: Otonomi Daerah
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PMPD	: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SV	: <i>Smart Village</i>
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari semua penduduk suatu masyarakat. Sumber daya manusia pada era teknologi sekarang merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena desa dianggap mampu berkembang dan berinovasi dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa. Dalam konteks Indonesia, pesatnya kemajuan teknologi informasi muncul hampir di semua aspek, mulai dari menjalankan penyelenggaraan pemerintahan hingga kehidupan bermasyarakat. Adanya kemajuan teknologi digital kini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Hampir seluruh masyarakat merasakan perubahan yang sangat pesat bagi tatanan hidup pada zaman yang semakin canggih.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan tercapai tanpa adanya penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adanya media sosial telah menjadikan alternatif teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya membangun sumber daya manusia karena kemudahan dalam penggunaannya menjadikan pengguna-nya begitu banyak sekali merasakan manfaatnya. Oleh karena itu pentingnya menciptakan dan membangun sumber daya manusia yang memumpuni sebagai kunci suksesnya masyarakat di era saat ini. Ketika Sumber daya manusia telah berkualitas, khususnya pada bidang teknologi maka akan terciptanya daya saing masyarakat yang kuat, dan mampu mendukung pembangunan nasional. Selain itu manfaat lain dari terciptanya sumber daya manusia yang memumpuni ialah akan mengurangi tingkat pengangguran sehingga akan banyak

lapangan pekerjaan dan target dalam pembangunan akan mudah tercapai di Indonesia terutama di wilayah pedesaan.

Pembangunan dan penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan agenda yang harus di upayakan serta pembangunan sumber daya manusia juga harus di fokuskan terhadap isu-isu lokal. Teknologi menuntut perubahan oleh setiap kegiatan manusia yang masih dilakukan secara manual agar dapat dipermudah dengan menggunakan teknologi, sehingga diharapkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dapat mendorong masyarakat dalam suatu organisasi dan lain sebagainya di lingkungan desa. Munculnya teknologi digital menciptakan informasi yang diakses lebih mudah dan cepat, transparansi serta efisien dan efektif dalam pelayanan pembangunan desa. Selain itu memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan mewedahi aspirasi secara online.

Desa merupakan pemerintahan pada tingkat terendah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional serta stabilitas nasional. Dengan begitu Desa didorong untuk maju dan mandiri dengan tujuan agar dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan sumber daya manusia di desanya. Terlebih dengan dukungan yang kuat oleh pemerintah, berupa dana desa, dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunannya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat 1). Desa perlu dikembangkan menuju desa yang cerdas. Salah satu langkah inovatif yang bisa dikembangkan dalam pembangunan desa yaitu melalui penerapan berbasis progam *smart village*. Dengan konsep digital ini, menampakkan apabila desa terhubung dengan fasilitas internet, maka desa akan menjadi lahan yang subur dan maju bagi masyarakat guna mencapai segala kegiatan produktivitas yang lebih baik di berbagai bidang dalam pembangunan sumber daya manusia di desa.

Program *smart village* adalah suatu pengembangan dari program *smart city*. Akan tetapi perbedaannya jika *smart city* berada di lingkup perkotaan sedangkan *smart village* adalah untuk desa. Karena banyaknya jumlah desa di Indonesia merupakan salah satu tantangan dalam upaya pembangunan desa yang baik. Menurut (Herdiana 2019:103) pelaksanaan program *smart village* yang benar harus ada tiga komponen penting dalam penerapannya, yaitu pemerintah desa (*smart government*), partisipasi masyarakat (*smart community*), dan kesesuaian lingkungan (*smart environment*).

Desa pintar merupakan desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Program *smart village* dimaknai sebagai representasi gerakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik di lingkup pedesaan sebagai capaian pelaksanaan dengan tempat kelompok *the bottom of pyramid* (Fitriansyah & Chaika, 2021:02). Selain pemerintahan desa, upaya literasi digital dilakukan dengan menggunakan *capability building* dari pemerintahan desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di Provinsi Lampung. Untuk mencapai pemikiran yang sinergi, adanya persamaan pendapat, dan mengemban peranan secara idealis, aparat dalam pemerintah desa diharapkan mampu mempunyai literasi digital, dan hal esensial lainnya yang berhubungan dengan persoalan secara optimal untuk memberikan daya dukung terhadap implementasi program disebut pada wilayah pedesaan. Selain adanya sinergitas *stakeholders*, dibutuhkan kemampuan yang mencukupi sebagai aparatur pemerintahan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung berperan sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan lembaga desa dan aparatur desa. Kemudian berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Dinas PMDT mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian, tugas dekonstruksi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sejalan dengan adanya janji kerja Gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024 yang ingin membangun desa pintar dengan tujuan fokus memasukan internet ke desa digitalisasi administrasi desa dan partisipasi masyarakat dan yang menjadi progam unggulan secara langsung dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di beberapa kabupaten maupun kecamatan. Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah provinsi Lampung membangun progam *smart village* untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan desa, sumber daya desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang efektif. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di tingkat desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya terdapat data rekap pengguna *smart village* di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 1. Rekap pengguna *smart village* Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Kategori Kode Data Wilayah OTDA			Lokus 2021	Penggua SV Desa	Total Penggua	Pengguna SV Kec	Potensi SV Desa	Potensi SV Kec
		Kec	Desa	Kel						
1	Lampung Barat	15	136	0	7	34	41	7	95	8
2	Tanggamus	20	302	0	7	125	132	5	170	15
3	Lampung Selatan	17	260	0	18	113	131	9	129	8
4	Lampung Timur	24	264	0	7	99	106	12	158	12
5	Lampung Tengah	28	311	0	31	117	148	23	163	5
6	Lampung Utara	23	247	0	4	31	35	4	212	19
7	Way Kanan	15	227	0	5	83	88	12	139	3
8	Tulang Bawang	15	151	0	15	89	104	10	47	5
9	Pesawaran	11	144	0	12	88	100	4	44	7
10	Pringgsewu	9	131	0	11	115	126	9	5	0
11	Mesuji	7	105	0	5	90	95	3	10	4
12	Tulang Bawang Barat	9	96	0	4	89	93	6	3	3
13	Pesisir Barat	11	118	0	4	31	35	3	83	8
14	Bandar Lampung	20	0	126	0	0	0	0	126	20
15	Metro	5	0	22	0	5	0	1	17	4
LAMPUNG		229	2.492	148	130	1.109	1.239	108	1.401	121

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022)

Data pada tabel 1. merupakan rekap pengguna *smart village* Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota dapat diperoleh hasil bahwa pengguna desa digital di Provinsi Lampung dengan total sebanyak 1.239 skor, sementara pengguna di kecamatan dengan total 108 dan Desa yang belum melaksanakan *smart village* sebanyak 1.401, serta kecamatan sendiri dengan total 121 juga belum menerapkan sistem desa digital.

Di Lampung Utara merupakan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya manusia paling kecil diantara kabupaten yang lainnya termasuk dalam pembangunan sumber daya manusianya sendiri masyarakat masih awam dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penerapan program *smart village* guna perwujudan menuju desa berbasis teknologi dan mampu dalam memberdayakan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tersebut. Terlebih di Kecamatan Abung Selatan memiliki potensi yang sangat kecil, banyak yang masih gagal dalam sistem teknologi di beberapa pemerintahan desa, sehingga diperlukan adanya wadah yang mampu menunjang peningkatan pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan melalui program *smart village*. Berikut dapat dilihat dalam tabel tentang penerapan *smart village* di Kecamatan Abung Selatan:

Tabel 2. *Smart village* Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara

No	KEC. ABUNG SELATAN	Lokus 2021	Pengguna SV Kec	Potensi SV Desa	Potensi SV Kec
1	Abung Jayo	Penganggaran Lewat Pihak Lain	1	1	1
2	Bandar Kagungan Raya	-	0	0	0
3	Bumi Raya	-	0	0	0
4	Cabang Abung Raya	-	0	0	0
5	Cabang Empat	-	0	0	0
6	Candimas	-	0	0	0
7	Gilih Sukanegeri	-	0	0	0
8	Kalibalangan	-	0	0	0
9	Kalibening Raya	-	0	0	0

10	Kemalo Abung	Penganggaran lewat pihak lain	1	1	1
11	Kembang Gading	-	0	0	0
12	Kembang Tanjung	Belum Premium	1	1	1
13	Ratu Abung	Belum Premium	1	1	1
14	Sinar Ogan	-	0	0	0
15	Trimodadi	-	0	0	0
16	Way Lunik	Sudah Premium	1	1	1
LAMPUNG UTARA			5	5	5

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022)

Pada Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara terdapat sebuah desa dengan total sebanyak 16 desa. Dalam hal ini yang sudah mempunyai Sistem Informasi Desa (SID) masih 5 desa diantaranya yaitu:

1. Desa Abung Jayo
2. Kemalo Abung
3. Kembang Tanjung
4. Ratu Abung
5. Way Lunik

Dari kelima desa tersebut terdapat dua desa yang melakukan penganggaran melalui pihak lain pada lokus Tahun 2021 yaitu desa Abung Jayo dan Kemalo Abung. Kemudian dua desa lainnya yaitu Desa Kembang Tanjung yang masih mendapatkan subdomainnya saja dan Ratu Abung dikategorikan belum premium. Sedangkan desa yang satu-satunya sudah premium di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara adalah Desa Way Lunik. Desa Way Lunik ini dikatakan sudah premium dan menjadi *smart village* karena telah mengimplementasikan program *smart village* dengan menggunakan elemen pertama yaitu *smart government*.

Desa Way Lunik merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan mempunyai luas 573,6000 Ha dengan

batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalibalangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamaju, sebelah utara berbatasan dengan Desa Semuli Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju dan Kalibalangan.

Desa Way Lunik ini mengawali penerapan program *smart village* dengan tujuan untuk membangun sumber daya manusia melalui wawasan serta pengetahuan masyarakat. Desa Way Lunik ditetapkan sebagai lokus yang menerapkan program *smart village* pada Tahun 2020 September dengan fokus utama pada penginputan data penduduk desa. Kemudian pada Tahun 2021 awal mulai melakukan penerapan pada pelayanan administrasi surat menyurat sampai dengan pemetaan wilayah dusun sampai saat ini. Menurut Fitriyono, S.H selaku *team official smart village* di Desa Way Lunik menyatakan bahwa dalam hal ini sangat terlihat jelas adanya *smart village* sangat memudahkan masyarakat karena segala urusan berbentuk data penduduk sudah tersistem secara digitalisasi. Berbeda dengan sebelum adanya *smart village* masih kesulitan dalam hal pendataan. Misalnya saja pada saat mencari arsip harus membuka buku terlebih dahulu.

Maka dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Way Lunik karena melihat pada kondisi status yang dulunya masih minim akan tingkat pembangunan desanya. Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Way Lunik sebanyak 0.7225 skor di Tahun 2022 saat ini menunjukkan tingkat pembangunan di desa tergolong dengan status maju kemudian skor minimal 0.8156 dengan target status mandiri.

Saat ini Desa Way Lunik telah menyediakan beberapa layanan komputer untuk implementasi teknologi digital. Selain itu penggunaan aplikasi komputer juga bermanfaat sebagai percepatan pelayanan administrasi publik agar pemberdayaan masyarakat bisa terwujud. Akan tetapi terdapat masalah-masalah sumber daya manusia di Desa Way Lunik yang dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3. Permasalahan sumber daya manusia di Desa Way Lunik

No	Permasalahan
1.	Kesadaran terhadap masyarakat sekitar akan penguasaan teknologi digital yang masih sangat minim
2.	Keakuratan data dan kemudahan dalam layanan administrasi desa masih kurang maksimal
3.	Sumber daya manusia yang belum memadai dalam penggunaan teknologi
4.	Perlu melakukan penataan kebutuhan sistem agar permasalahan yang terjadi di desa dapat segera teratasi dengan penggunaan teknologi
5.	Koneksi internet atau akses jaringan yang terbatas dan listrik yang masih menjadi kendala bagi masyarakat

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022)

Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung menjalankan program berbasis *smart village* melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor:G/7/V.12/HK/2021 baru terdapat 130 desa sasaran program *smart village* dari 2435 desa yang ada di Provinsi Lampung dan permasalahan-permasalahan SDM ini bisa dipecahkan menggunakan program *smart village* yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.36 Tahun 2020 bahwa dibutuhkan kegiatan peran pembinaan dan pengawasan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, partisipatif dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan kepada upaya peningkatan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi administrasi desa dan partisipasi masyarakat desa atau *e-participation*.

Dapat diartikan kebijakan *smart village* Provinsi Lampung ialah kebijakan yang di wujudkan sebagai pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung serta kelompok perangkat pemerintahan desa yang terlibat merupakan kelompok-kelompok terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung selaku kelompok yang mendatangi semua kelompok perangkat daerah dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan di jalankan.

Sehingga berdasarkan pada permasalahan sumber daya manusia pada tabel 3, maka penulis hendak melakukan penelitian terkait peran dinas pemberdayaan masyarakat, desa dan transmigrasi dalam pembangunan SDM melalui program *smart village* yang bertujuan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di desa dengan sasaran pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran kerangka pikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti dengan paparan seperti dibawah ini:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghifari Kamal Maulana (2021) dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Kampung Marketer untuk Mengembangkan SDM Digital Marcom Di Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kampung Marketer dalam mengembangkan SDM Digital Marcom. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam merealisasikan pengembangan SDM Digital Marcom. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan SDM digital Marcom di Purbalingga ialah menyusun kurikulum dan metodologi pendidikan di bidang IT berbasis marketing online bagi masyarakat, Melaksanakan pendidikan dan pelatihan melek IT untuk membentuk masyarakat yang terampil di bidang IT yang berbasis *marketing online*, memberdayakan masyarakat yang melek IT berbasis *marketing online* untuk dapat berjejaring dengan mitra sebagai bentuk keberlanjutan untuk meningkatkan pendapatan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Irsyad Hidayat (2022) dengan judul *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan SDM Melalui Literasi Digital*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Pemerintah Desa dalam pengembangan SDM di Desa Ciburial melalui literasi digital, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pengembangan kualitas SDM di Desa Ciburial melalui literasi digital, untuk mengetahui hasil capaian Pemerintah Desa dalam pengembangan SDM di Desa Ciburial melalui literasi digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam upaya pengembangan SDM melalui literasi digital pemerintah desa berperan vital dalam membuat berbagai kebijakan maupun program dengan membangun sinergitas antar lembaga terkait di dalamnya yang dapat menjadi roda penggerak masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ciburial melalui program literasi digital merupakan sebuah proses pengembangan SDM secara merata dan berkelanjutan agar kemudian masyarakat dapat lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Amerieska, Ludfi Djajanto, Santi Rahayu, Aang Afandi, Andi Kusuma, Erlin Melani, Fadelis Sukya Muhammad, Akhlis Rizza (2022) yang berjudul *Human Resources Capacity Based on Smart Village in Wringinsongo Village* Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis *Smart Village* pada Desa Wringinsongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *smart village* dalam konteks desa-desa di Indonesia meskipun banyak dipengaruhi oleh pengembangan *smart city*, tetapi harus dikonstruksikan secara berbeda. *Smart village* harus dipahami sebagai upaya pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan PKM *smart village* di Desa Wringinsongo ini memberikan pandangan ke depan bagi Tim PKM untuk memberikan pendampingan implementasi aplikasi SIM-RI winK dengan menggunakan implementasi teknologi, harapannya perangkat Desa Wringinsongo dapat memanfaatkan aplikasi sehingga pelayanan prima dapat dengan mudah dilakukan bahkan ditingkatkan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Iswanto (2021) yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah Desa dalam Membangun *Smart Village Governance* (Studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan fokus pada pokok pembahasan peranan pemerintah daerah dalam membangun budaya literasi aparatur pemerintah desa melalui tiga peranan yaitu peranan sebagai fasilitator dan peran dalam pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat dua peranan utama pemerintah daerah dalam upaya membangun literasi digital bagi aparatur pemerintah desa dalam mengelola *smart village* diantaranya adalah peran sebagai fasilitator, peran dalam pendidikan dan pelatihan. Peran sebagai fasilitator sudah dapat dilaksanakan dengan adanya upaya program pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa dengan melibatkan berbagai aktor yang terlibat. Peran dalam pendidikan dan pelatihan juga dilakukan dengan adanya kontribusi langsung diklat dari dinas terkait untuk menumbuhkan budayamelek teknologi dalam memberikan pelayanan publik dilingkup desa setempat sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah belum adanya upaya secara konsisten untuk benar-benar melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam membangun sistem ini sehingga kedepannya diharapkan untuk adanya pembenahan sistem *monitoring* dan evaluasi.
5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dian Herdiana (2019) yang berjudul Pengembangan Konsep *Smart Village* bagi Desa-Desa di Indonesia. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif (model *building method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *smart village* harus dipahami sebagai upaya pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi yang seiringan dengan peningkatan kualitas kemajuan desa. Terdapat tiga elemen pokok *smart village*, yakni *smart government*, *smart community* dan *smart environment* yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan “*smart relationship*”

atau keterjalinan konstruktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Output yang dihasilkan berupa sinergitas antar elemen *smart village* berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, sedangkan *outcome* berupa produktivitas elemen *smart village* yang mampu mendorong perbaikan ketiga elemen tersebut.

Dari uraian tersebut yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda, kedua terletak pada fokus kemauan Sumber daya manusia itu sendiri dalam pelatihan melek IT guna mengembangkan desa. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peranan dari dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi dalam membangun sumber daya manusia berbasis program *smart village* dengan menggunakan tiga elemen yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment* di Desa Way Lunik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam Pembangunan SDM melalui Program *Smart Village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara?
- 2) Apa saja faktor pendorong dan penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam Pembangunan SDM melalui Program *Smart Village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam Pembangunan SDM melalui Progam *Smart Village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam Pembangunan SDM melalui Progam *Smart Village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan ataupun masyarakat serta sebagai pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis progam *smart village*.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pembangunan sumber daya manusia melalui progam *smart village*, yang secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan analisis dan bermanfaat bagi wawasan ilmu pengetahuan maupun lembaga-lembaga lainnya yang berwenang dalam ruang lingkup dan keterbelakangan serta ketidaktahuan masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia melalui teknologi digital bagi desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Smart Village*

Smart village merupakan suatu rangkaian konsep dalam pembangunan desa yang mempunyai solusi bagi masalah desa dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Program *smart village* diharapkan mampu memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Selain itu pada program *smart village* juga tersedia akses energi secara efektif dan efisien berdasarkan pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya konsep ini pemerintah diharapkan bisa memberikan penguatan pada usaha mikro kecil dan menengah dalam proses pemasaran pada produk mereka dan layanan pemerintah seperti surat juga dapat dipermudah dengan layanan berbasis teknologi, dan tidak hanya memfokuskan pada kecanggihan teknologi itu sendiri, akan tetapi *smart village* juga harus mampu membentuk sumber daya manusia agar manusia lebih sadar tentang perkembangan teknologi digital, dengan begitu perubahan ini akan menunculkan inovasi-inovasi dari masyarakat untuk memunculkan peluang dalam mata pencaharian penduduk desa.

Menurut Baru, dkk, (2019:68-80) Smart kampung atau *smart village* merupakan pengembangan konsep dimana masyarakat desa berada dalam sebuah komunitas yang mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat dan budaya setempat, sekaligus norma-norma yang berlaku. Konsep pengembangan *smart village* ini tidak hanya berfokus terhadap penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, akan tetapi merujuk pada perubahan

keadaan desa menjadi yang lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusianya.

Menurut Herdiana (2019:103) terdapat tiga elemen penting dalam *smart village* yakni *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Dari ketiga elemen tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan konsep *smart village* yaitu *smart relationship* artinya hubungan konstruktif yang muncul dari ketiga elemen yang bersinergi menjadi satu dengan berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi demi kesejahteraan desa.

Desa pintar memberikan banyak manfaat kehidupan bagi masyarakat pedesaan pada abad ke-21, serta mencerminkan tingkat pembangunan pedesaan yang konsisten dengan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Desa pintar memberikan dampak katalitik dari layanan energi berkelanjutan, sehingga memungkinkan konektivitas melalui teknologi informasi dan komunikasi modern, penduduk desa pintar menjalani kehidupan yang sehat dan memuaskan, dapat mencapai potensi pengembangan diri, memperoleh kehidupan yang layak, serta dapat terhubung dengan dunia luar.

Berikut ini yang menjadi dasar pelaksanaan *smart village* menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 dalam bab 1 Pasal 1 antara lain:

- a. Meningkatkan literasi internet dan layanan administrasi bagi masyarakat Way Lunik
- b. Memfasilitasi digitalisasi administrasi Way Lunik
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online atau aplikasi.

2.1.1 Model *Smart Village*

Konsep *smart village* dipahami oleh para ahli sebagai hubungan integrasi teknologi informasi dalam lingkungan kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga memunculkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat di wilayah pedesaan. Jika dilihat dari dimensi sumber daya, teknologi menjadi bagian yang mendasar bagi terlaksananya program *smart village*, sedangkan untuk layanan digital, rantai layanan menjadi dimensi yang berbeda menurut ahli. Adanya kesamaan pemahaman tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa di dalam penerapan teknologi informasi dibutuhkan adanya kapabilitas dari institusi untuk pemegang dan dukungan kemampuan sumber daya. Apabila dikaitkan dengan lingkup desa-desa di Indonesia, maka pemahaman dari para ahli tersebut harus dipahami secara tegas, akan tetapi harus menjadi sebuah kesatuan. Institusi harus dicermati sebagai lembaga negara yang formal. Institusi diletakkan kepada adanya kewenangan dan hak yang diberikan dalam menyusun rancangan kebijakan pengembangan *smart village*.

Lembaga pemerintah, masyarakat, dan lingkungan pedesaan adalah elemen pembentuk *smart village* yang mempunyai peran dan fungsi berbeda. Akan tetapi dari ketiga elemen tersebut menjadi acuan integrasi untuk saling mempengaruhi. Dengan begitu program *smart village* harus didasarkan terhadap akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk karakter, peran dan fungsi yang dilaksanakan dari masing-masing elemen tersebut.

2.1.2 Elemen *Smart Village*

Elemen dari konsep *smart village* bergantung terhadap ciri wilayah dan visi pengembangan dengan menerapkan konsep tersebut dalam pembangunan desa. Masih rendahnya pengkajian tentang *smart village* daripada *smart city*, beberapa peneliti mengemukakan dalam pengembangan *smart village* mampu dilaksanakan dengan menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh Giffinger oleh pedoman

master plan smart city yang dikeluarkan oleh kemenkominfo. Pengembangan *smart village* mempunyai dimensi yang sangat sesuai dengan kondisi lingkungan pedesaan seperti pemerintah yang cerdas, masyarakat yang cerdas, ekonomi yang cerdas, serta lingkungan yang cerdas. Menurut (Herdiana 2019:103), terdapat tiga elemen ketercapaian dalam *smat village* yang menjadi acuan bagi penerapan *smart village* yang sinergis antara ketiganya. Berikut tiga elemen *smart village* sebagai berikut:

a. Smart Government

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari unsur masyarakat yang menjadi landasan dalam orientasi kebijakan pemerintahan desa. Pemanfaatan dari teknologi informasi dalam *smart village* bagi pemerintahan desa mampu memudahkan proses kegiatan pembangunan desa sekaligus mampu meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintah dapat berjalan efektif, efisien dan transparan.

Smart government adalah pemerintahan yang cerdas, terbuka, partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan *e-government* yakni pemerintahan yang memanfaatkan teknologi komunikasi dalam pengelolaan pemerintahannya untuk mencapai transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik dengan memanfaatkan media sosial dalam menampung aspirasi masyarakat.

Indikator yang termasuk ke dalam *smart government* yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial dan transparansi tata kelola. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan pelibatan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan. Ketersediaan

layanan publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat yang di berikan pemerintah secara online. Transparansi tata kelola menjabarkan terkait jenis media yang di sediakan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan mekanisme keterbukaan program perencanaan (Eniyati, dkk: 2017:18-28).

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (Siti Fatimah, 2012:10).

Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.

- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah.

2) Ketersediaan Layanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan beserta aparturnya kepada *stakeholder* dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan sekaligus memberikan kepuasan kepada *stakeholder* yang dilayani.

Dalam pengertian lain, pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Konsep pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok atau dasar bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Artinya pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang dan jasa yang sebelumnya

dianggap barang mewah, dan terbatas kepemilikannya dan tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi barang pokok yang diperlukan oleh sebahagian besar masyarakat, dengan demikian perubahan besar pada konsep kebutuhan pokok masyarakat, terkait erat tingkat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perubahan politik.

3) Transparansi Tata Kelola

Transparansi merupakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan. Secara umum, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki (Zamzani, Faiz, & Dkk, 2018).

Dengan demikian visi-misi tersebut harus tentang perencanaan kedepannya. Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi, kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi- fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu

sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku pengguna pelayanan.

b. *Smart Community*

Smart community adalah masyarakat yang cerdas dalam artian dapat berkontribusi dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Indikator *smart community* merupakan kontribusi masyarakat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Masyarakat merupakan tokoh utama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan desa, bukan hanya sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga masyarakat pedesaan dituntut aktif dalam proses pengembangan desa guna merasakan manfaat dari adanya suatu program pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu peluang dalam pengoptimalan peran serta kontribusi dalam pengembangan desa. *Smart community* merupakan sebuah komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pembisnis, pendidikan, lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan.

Masyarakat desa mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Masyarakat desa berhak dalam :

- a. Meminta dan mendapat informasi dari pemerintah desa serta mencari tahu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan diberikan arahan serta pemberdayaan masyarakat desa
- b. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara adil
- c. Mengungkapkan pendapat secara bertanggung jawab dalam agenda pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa
- d. Memilih, dipilih atau ditetapkan dalam struktur pemerintahan desa
- e. Mendapatkan perlindungan dari ketidakamanan di desa

Adapun kewajiban masyarakat desa sebagai berikut:

- a. Memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong tercapainya kegiatan pemerintahan desa dan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- c. Memberikan dukungan akan ketertiban di dalam desa
- d. Melaksanakan kegotong royongan di desa
- e. Ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa

1) Masyarakat Memahami Potensi TIK

Internet menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari segala penjuru dunia. Orang dengan mudahnya bisa melewati pintu menuju berbagai informasi, membuka peluang semua orang dari segala penjuru dunia untuk bertukar informasi dan pengetahuan. Mempermudah orang untuk melakukan berbagai kegiatan, dan meningkatkan pendapatan. TIK adalah teknologi yang tidak hanya ada pada teknologi computer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi ini akan digunakan untuk memproses dan menyimpan sebuah informasi. Teknologi ini juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan sebuah informasi.

Harapan masyarakat terhadap keberadaan TIK memang demikian besar, khususnya di kalangan pelajar, pengusaha, dan petani. Keberadaan TIK sangat mendukung dalam aktivitas kegiatannya, pada segmen masing-masing kepentingan, hal ini sudah menjadi sifat dasar manusia untuk berusaha memenuhi segala kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya, salah satu fenomena yang menarik, jika dihubungkan dengan sifat dasar manusia dalam hal pencarian kemakmuran dewasa ini. Teknologi informasi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam suatu kehidupan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, padat dan terdiri dari beragam suku bangsa, penduduk tersebar tidak merata, yang disebabkan oleh kesenjangan pelaksanaan pembangunan antar

perdesaan dan perkotaan maupun antar kawasan. TIK dapat berperan sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan upaya untuk mengatasi kemiskinan, sehingga akan berdampak terhadap semakin berkurangnya tingkat kemiskinan, yang disebabkan oleh masyarakat semakin banyak mendapatkan informasi, di bidang pekerjaan, pertanian, membudidayakan potensi daerah, sehingga masyarakat akan semakin cerdas dengan mendapatkan berbagai informasi yang diterimanya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sebenarnya memiliki keuntungan yang sangat besar, karena dapat menlompati beberapa tahap pembangunan yang harus dilewati oleh negara yang lebih maju sebelumnya, dengan memanfaatkan secara optimal kemajuan teknologi informasi yang telah dicapai, melalui perkembangan TIK, pergerakan informasi, pengetahuan dan interaksi dapat difasilitasi secara lebih cepat dengan biaya minimal.

2) Masyarakat Membantu dalam Pembangunan Desa melalui TIK

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelaksanaan pembangunan di era digital ini memerlukan sistem komunikasi konvergen yang melibatkan media masa dan media internet, dengan tujuan agar banyak pihak dari berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan pembangunan desanya.

Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan desa melalui teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari pelatihan TIK dasar bagi perangkat desa, pelatihan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan program pemberdayaan *website* desa serta layanan pengembangan jaringan internet desa. Hasil dari upaya-upaya tersebut yakni sebagai media desa dan penerapan teknologi tepat guna khusus bidang TIK perdesaan. Suparno (2001: 46) menegaskan bahwa pembangunan desa

dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Ada dua hal yang bisa dilihat bagaimana TIK berpengaruh bagi pembangunan. Pertama, bagaimana akibat kemajuan tersebut bagi upaya meningkatkan kehidupan sebagian besar masyarakat yang selama ini telah tertinggal dibandingkan mereka yang berada di negara maju. Kedua, bagaimana TIK dapat dieksploitasi oleh negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses ke pasar dunia dan memaksimalkan kelebihan kompetitif (*competitive advantages*) mereka.

Pembangunan pedesaan berbasis internet dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Kedepan inisiatif desa-desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh *stakeholders* terutama pemerintah, dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan, praktisi teknologi informasi sebagainya. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Desa maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik, sehingga desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi.

3) Adanya Komunitas yang Mengembangkan TIK

Masyarakat mengandung pengertian tentang suatu kesatuan kelompok orang yang berhimpun, berkumpul dan bersatu dalam suatu wadah baik bentuk organisasi formal maupun nonformal yang menempati tempat tertentu, mempunyai ciri-ciri seperti adanya ikatan dan mempunyai kesamaan-kesamaan atas beberapa hal. Setiap kelompok masyarakat selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan agar tidak tersingkirkan (Sutarno, 2005). Informasi merupakan data-data yang diolah melalui suatu sistem pengelola sehingga memiliki arti dan bernilai bagi seseorang. Selain itu, informasi dapat diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan

yang terus berkembang sejalan dengan usaha dan kemampuan manusia sesuai dengan kegunaannya.

Misi utama masyarakat informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi dan terdokumentasi serta tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara cepat, tepat dan bermanfaat. Masyarakat informasi ditandai dengan adanya perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber dan saluran informasi, perilaku penemuan informasi yang merupakan upaya dalam menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu, perilaku mencari informasi yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, dan perilaku penggunaan informasi yaitu perilaku yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya.

Penerapan dan pengembangan TIK merupakan satu proses dimana sistem yang dibangun tidak bisa langsung sempurna tetapi dibangun secara bertahap dan diperbaiki agar memenuhi harapan pelayanan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat desa sehingga menghasilkan sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Sistem yang sekarang dapat menjadi dasar untuk pengembangan sesuai dengan perubahan peraturan dari peraturan yang lama menjadi baru yakni Undang-Undang tentang Desa.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kini telah mengubah cara pandang dan bertindak masyarakat dalam menghabiskan waktu untuk bekerja dan mengatasi segala permasalahannya. Muncul paradigma baru dalam masyarakat yang mengekspresikan perubahan baru dalam aktifitas kehidupan masyarakat sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi.

Agar seluruh masyarakat bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan hal ini, berikut adalah beberapa upaya agar teknologi bisa dimanfaatkan masyarakat:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi.
- b. Menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat.
- c. Membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan digunakan masyarakat.
- d. Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan.
- e. Melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana teknologi.

c. *Smart Environment*

Pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing yang sangat berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Pada konsep *smart village* suatu lingkungan bukan hanya berorientasi pada lingkungan alam saja, namun mencakup seluruh elemen yang membentuk karakter desa yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial pada lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam terdiri dari pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya seperti dalam hal pendataan, dokumentasi dan pengidentifikasian potensi alam secara proposional tanpa merusak tatanan alam. Dalam konsep *smart village* disebutkan bahwa indikator *smart environment* memiliki karakteristik yang berkaitan dengan efisiensi dan berkelanjutan.

1) Masyarakat Memanfaatkan TIK untuk Memelihara Kelestarian Lingkungan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam pelestarian lingkungan hidup. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Lingkungan sekitar kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Diakui memang, untuk bisa mendapatkan teknologi ini dibutuhkan biaya cukup mahal bila dibandingkan membeli peralatan dengan teknologi konvensional. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi kita utamanya para pengembang untuk menciptakan teknologi hijau yang ramah akan lingkungan namun juga terjangkau harganya (murah).

Mitchell, dkk 2003 menyatakan bahwa konsep pelestarian lingkungan modern mesti berisikan upaya pemanfaatan lingkungan sekaligus memelihara keberlanjutannya. Salah satu paket strategi mempertahankan kelestarian lingkungan adalah: (1) Memperkuat kapasitas perencanaan lokal dengan memasukkan aspek konservasi ke dalam perencanaan spasial, (2) Rasionalisasi hak-hak atas sumber daya, seperti hak atas tanah, dan (3) Pengembangan area lokal.

Sehingga manfaat teknologi bagi lingkungan sangat diharapkan dalam perkembangannya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa teknologi tidak selamanya berdampak negatif. Di sisi lain kehadiran teknologi justru diciptakan untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana ilmu, tingkat prestasinya adalah ketika ilmu yang kita dapat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Terlebih kebersihan lingkungan yang menjadi cerminan karakter dari

penduduknya. Jika teknologi yang diciptakan tidak memberikan kemanfaatan, artinya teknologi tersebut adalah produk gagal. Teknologi bukanlah alat agar kita bermalas-malasan, tetapi justru menyemangati kita dalam hal bagaimana memberikan solusi permasalahan yang ada. Banyak dari kita yang terlampau bingung dalam memecahkan masalah kebersihan lingkungan. Karenanya teknologi hadir sebagai jawaban atas problem bersama.

Zaman sekarang sudah menjadi hal biasa jika orang kelas menengah ke bawah membersihkan ruang tamu menggunakan *vacuum cleaner*. Di samping bisa membersihkan debu di lantai, juga bisa menyedot debu di tempat-tempat yang sulit terjangkau. Hal ini adalah produk teknologi yang semakin matang dan merata harganya sampai kelas ekonomi. Seiring hal itu, kelestarian lingkungan tetap terjaga. Pada dasarnya, teknologi lebih kepada konsep *zero waste*, menggunakan strategi ramah lingkungan, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terbentuknya limbah.

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari pengendalian teknologi kelestarian lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Resiko atas kesehatan dan lingkungan

Sebagaimana yang telah menjadi alasan diciptakannya teknologi, bahwa resiko kesehatan atau keselamatan jiwa dan kebersihan lingkungan lebih penting dibanding jalannya proses kinerja teknologi. Dalam hal ini, perlu ketelitian dalam berinovasi. Sebab, bila ada sedikit kesalahan saja yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan masyarakat, maka akan berakibat fatal.

b. Bersaing produk dengan pasar internasional

Persaingan ketat di pasar tradisional membuat para peneliti, pembuat, dan pengguna teknologi semakin serius dalam mengembangkan kemajuan produk lokal, hingga mencapai pada tingkat pengakuan dunia. Karenanya, cendekiawan terus berlomba, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi.

c. Menghemat biaya

Biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan teknologi sangat efisien dan tidak boros. Hal ini disebabkan karena menghitung jumlah keseluruhan pengeluaran yang lebih menekankan poros kualitas kinerja.

d. Terjalin kerja sama antara pemerintah, agro-industri dan masyarakat

Biasanya kerja sama dilakukan melalui perjanjian antara ketiga pihak, agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jika tidak ada perjanjian atau ada perjanjian, namun salah satu dari ketiga pihak dirugikan, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berakibat *chaos* antara masyarakat.

e. Mendorong kinerja yang lebih baik

Jika suatu daerah sudah bergerak menggunakan teknologi, biasanya daerah lain akan terdorong semangat memajukan daerah setempat dengan berbagai inovasi lain dengan teknologi yang lebih canggih dan terpercaya.

f. Mensinergikan antara produk satu dengan produk lainnya

Produk yang saling berkesinambungan akan menjadikan kerja semakin cepat dan menghemat waktu. Biasanya, hal ini terjadi saat *sharing* antara penemu produk satu dengan penemu produk lainnya. Kemudian, masing-masing akan menyetujui proyek hubungan bilateral.

g. Menghemat waktu

Selain menghemat biaya, penggunaan teknologi juga lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Tidak terlalu banyak proses yang ditunda-tunda. Sebab, salah satu dasar adanya teknologi adalah penghematan waktu.

2) Memelihara Nilai Adat dan Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya, seperti dikutip dari buku KEMENBUDPAR bertajuk "Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan". Maksud dari melestarikan budaya adalah agar nilai-nilai luhur budaya, yang ada di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan, meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya.

Mengenai proses kebudayaan dan strategi atau pola yang digunakannya, perlu untuk merujuk pada pengertian kebudayaan yang diajukan oleh Prof. Dr. C.A. Van Peursen (1988:233), berikut ini: Kebudayaan sebetulnya bukan suatu kata benda, melainkan suatu kata kerja atau dengan lain perkataan, kebudayaan adalah karya kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Demikian kebudayaan dilukiskan secara fungsional, yaitu sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu nampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh umat manusia. Kebudayaan tidak terlaksana diluar kita sendiri, maka kita (manusia) sendirilah yang harus menemukan suatu strategi kebudayaan. Termasuk dalam proses melestarikan kebudayaan. Karena, proses melestarikan kebudayaan itu adalah pada hakekatnya akan mengarah kepada perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu.

Cara-cara yang bisa di lakukan untuk melestarikan budaya daerah sekitar kita, diantaranya:

- a. Memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Contohnya dengan mempelajari tarian dan juga alat musik daerah sekitarmu.
- b. Menggunakan pakaian adat, sesuai dengan acara-acara tertentu. Mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga.
- c. Mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba/pentas seni di daerah sekitar.

Cara menghargai keberagaman budaya daerah banyaknya budaya yang kita miliki tidak hanya cukup untuk dilestarikan, namun budaya daerah juga perlu kita hargai. Beberapa cara untuk menghargai keberagaman budaya di sekitar kita adalah:

- a. Tidak menjelek-jelekan atau menghina suku dan ras bangsa lain.
- b. Menghormati adat istiadat daerah lain.
- c. Senantiasa untuk mau mengenal adat istiadat dari berbagai budaya suku yang ada di Indonesia.

2.1.3 Manfaat *Smart Village*

Manfaat dari pelaksanaan *smart village* melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Desa adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan produktifitas dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan transparan.
2. Membantu masyarakat Desa dalam pelayanan administrasi dan partisipasi dengan tersedianya sarana dan prasarana Desa yang mendukung.
3. Membangun literasi digital di Desa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan peran serta kerjasama para pemangku kepentingan desa, supra desa (Provinsi dan Kabupaten), *stakeholder* atau unsur *pentahelix* lainnya dalam membangun desa.

2.2 Konsep Peran Dinas PMDT

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status (Horton, 1999: 118). Status atau kedudukan didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut.

Menurut Siagian (1992) pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara

dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kemudian Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Innovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan

nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah atau Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat memiliki peran dan wewenang penuh untuk membantu, memotivasi dan mengajak masyarakat desa dalam membangun desa ataupun mengajak masyarakat agar lebih berdaya, serta meningkatkan pendapatan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki fungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, meningkatkan kekompakan antar masyarakat, meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, dan pengembangan potensi sumberdaya dalam pembangunan di masyarakat.

Dalam hal ini peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi berkaitan dengan program *smart village*, yang mana program *smart village* merupakan program yang memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Sehingga di dalam hal ini Dinas PMDT mempunyai peran sendiri sebagai berikut:

1. Menjalankan elemen *smart government*, dengan indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial, serta transparansi tata kelola.
2. Menjalankan elemen *smart community*, dengan indikator masyarakat memahami potensi TIK, masyarakat membantu pembangunan desa melalui TIK, serta adanya komunitas yang mengembangkan TIK.
3. Menjalankan elemen *smart environment*, dengan konsep efisiensi dan keberlanjutan meliputi indikator memanfaatkan TIK untuk melestarikan lingkungan, memelihara nilai adat dan budaya.

Maka bisa disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi merupakan pelaku dari sikap dinamis yang dilakukan oleh beberapa anggota di dalam kehidupan berkelompok dengan kemudian akan terjadi interaksi antara perangkat desa yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. Sehingga dengan adanya hubungan antar masyarakat inilah yang disebut dengan peran.

Untuk menyelenggarakan peran serta tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian
5. Pengelolaan Administratif

2.3 Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan merupakan usaha guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merangkum berbagai aspek kehidupan secara berkesinambungan yang hasilnya akan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara rata. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dorongan, daya, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi pembangunan bagi informasi, tersedianya kemampuan dan memadainya pengetahuan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sumber daya manusia mengacu pada orang-orang yang dapat bekerja untuk memberikan pelayanan atau melaksanakan tugas sesuai kemampuan. Suatu organisasi harus memiliki suatu sumber daya manusia yang kompetitif sehingga tidak mengalami kemunduran oleh karena itu perlu dilakukan salah satu kegiatan secara berencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Pengembangan sumber daya manusia ditunjukkan untuk mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, mandiri, bekerja keras, produktif, kreatif, inovatif, disiplin, berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sehubungan dengan itu kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk para individu agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi organisasi.

Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai layanan berbasis teknologi informasi sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaannya program desa digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa di desa masih terdapat aparat dan masyarakat desa yang belum melek internet dan teknologi. Dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pengembangan dalam mengatasi masalah sumber daya manusia seperti penguasaan teknologi digital yang masih sangat minim, layanan administrasi desa masih kurang maksimal, sumber daya manusia yang belum memadai dalam penggunaan teknologi, perlunya melakukan penataan kebutuhan sistem, serta jaringan internet yang terbatas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membangun sumber daya manusia itu sendiri adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap perkembangan teknologi,
- 2) Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan teknologi dan permasalahan di desa dapat teratasi,
- 3) Menambah wawasan pengetahuan teknologi. Fokus utama dari pengembangan sumber daya manusia di Indonesia meliputi aspek kepribadian, sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi serta profesionalisme dalam pekerjaan.

Sehingga kapasitas berfikir manusia merupakan bagian dari sumber daya manusia yang paling penting. Karena berfikir merupakan pondasi utama bagi kebudayaan. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, mudah mengolah sumber daya alam sebagai kepentingan dalam hidupnya dan bidang mengubah kondisi sumber daya alam berkat adanya kemajuan dari ilmu dan teknologi informasi. Dengan pemikirannya, manusia menggunakan sumber daya alam sebagai kebijaksananya. Sehingga manusia tidak dapat dipandang hanya sebagai sumber energi saja, akan tetapi yang paling utama adalah sumber daya mentalnya yang sangat penting untuk perkembangan dari kebudayaan manusia.

2.4 Hubungan Peran DPMDT dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Hubungan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk menjadikan sumber daya manusia-nya menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka yang nantinya dapat meningkatkan kinerja mereka. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, kedalam posisi yang memberi kesempatan untuk lebih bertanggung jawab. Salah satu unsur yang memegang peran penting dalam suatu organisasi adalah manusia. Karena, manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari hadirnya paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered*). Paradigma ini menuntut penempatan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Sehingga kaitan antara peran Dinas PMDT dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi secara langsung mempunyai hubungan dalam lembaga pemerintahan desa dengan

melakukan koordinasi mengenai layanan administrasi desa, pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa, dan meningkatkan partisipasi bagi perangkat desa serta masyarakat dalam keterampilan dan kemampuan pemanfaatan teknologi berbasis *smart village* untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia Yang berkualitas dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai proses pemberian layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik agar memudahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa sehingga besar kemungkinan masyarakat menjadi terbiasa dengan pemanfaatan teknologi.

Kemudian dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan supaya adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien. Sehingga hal ini terdapat hubungan yang selaras antara Dinas PMDT dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan Penyebarluasan pemanfaatan teknologi di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat.

2.5 Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat juga selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa. (Solekhan,2012:19) Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yaitu: a. Sekertaris desa, adalah unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa. b. Unsur pelaksanaan teknis, adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain. c. Unsur kewilayahan, adalah pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, dan dapat memberikan pelayanan sosial dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sejahtera, tentram, aman dan keadilan. Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata perusahaan, tata pemerintahan yang baik melibatkan 3 pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (Abdullah, 2009:20).

2.5.1 Pengertian Desa

Dalam pengertian Desa menurut UU. No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Adapun dinamika masyarakat pada tingkat desa bisa terwadahi dalam tiga institusi utama sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa adalah elemen pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai penampung, penyalur, mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penetapan sebuah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Karang Taruna, PKK, GAPOKTAN serta kelompok-kelompok organisasi lainnya adalah mitra pemerintahan desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakatnya dan sebagai akomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan desa serta gotong royong desa.

Ketiga unsur diatas mampu bekerjasama dalam mewujudkan, mempercepat dan memperkuat penerapan otonomi desa sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sendiri yang secara tegas telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Fungsi Desa

Adapun fungsi desa dapat dilihat sebagai berikut ini:

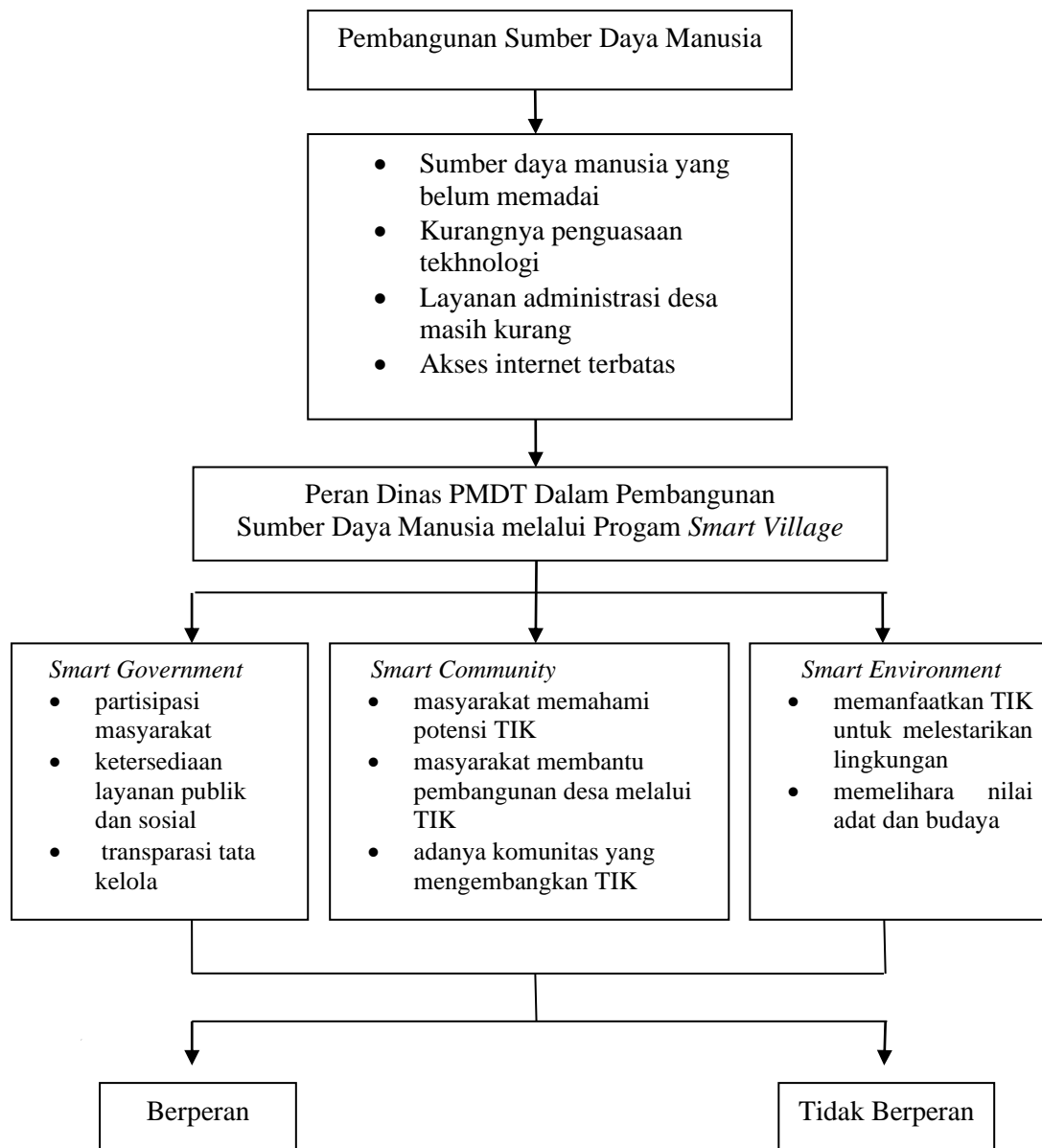
1. Desa adalah *hinterland* atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok, seperti padi, jagung dan sebagainya.
2. Desa dilihat dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

2.6 Kerangka Pikir

Pembangunan dan penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan agenda yang harus diupayakan serta pembangunan sumber daya manusia juga harus di fokuskan terhadap isu-isu lokal. Dengan begitu desa didorong untuk maju dan mandiri dengan tujuan agar dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan sumber daya manusia di desanya. Dengan konsep digital inilah, menampakkan apabila desa terhubung dengan fasilitas internet, maka desa akan menjadi lahan yang subur dan maju bagi masyarakat guna mencapai segala kegiatan produktivitas yang lebih baik di berbagai bidang dalam pembangunan sumber daya manusia di desa.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti berpendapat masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Way Lunik sendiri. Pertama, kesadaran terhadap masyarakat sekitar akan penguasaan teknologi digital yang masih sangat minim. Kedua, layanan administrasi desa masih kurang maksimal. Ketiga, sumber daya manusia yang belum memadai. Keempat, perlu melakukan penataan kebutuhan sistem di desa. Terakhir, koneksi internet atau akses jaringan yang terbatas. Oleh karenanya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis program *smart village* dilihat dari ketiga elemen *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pembangunan sumber daya manusia berbasis program *smart village* di Desa Way Lunik. Sehingga dapat diperoleh hasil akhir bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi apakah berperan atau tidak berperan dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis program *smart village* di Desa Way Lunik, dianggap berperan jika semua elemen *smart village* yaitu *smart government*, *smart community* dan *smart environment* telah terimplementasi dan memperoleh rentang diatas 76% - 100%. Sedangkan dianggap tidak berperan apabila dari ketiga elemen *smart village* belum terimplmentasi atau hanya memperoleh rentang 0% - 35% atau disebut dengan kategori rendah.

Gambar 1.

Kerangka Pikir

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis program *smart village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan permasalahan ini. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Alasan menggunakan metode tersebut karena penelitian ini difokuskan dalam pemecahan permasalahan yang ada di desa menggunakan program *smart village*. Sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program *smart village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara serta untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pembangunan sumber daya manusia tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan elemen dari program *smart village* yaitu:

1. *Smart government*, dengan indikator sebagai partisipasi masyarakat, ketersediaan layanan publik dan social, dan transparansi tata kelola.
2. *Smart community*, dengan indikator masyarakat memahami potensi TIK, masyarakat membantu pembangunan desa melalui TIK, adanya komunitas yang mengembangkan TIK.
3. *Smart environment*, dengan konsep efisiensi dan keberlanjutan meliputi indikator memanfaatkan TIK untuk melestarikan lingkungan, memelihara nilai adat dan budaya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan kegiatan penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan topik yang akan dibahas. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Way Lunik ini sudah mulai menerapkan program *smart village* pada Tahun 2021 untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

3.4 Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer mengenai peran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam pembangunan SDM melalui program *smart village* di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu referensi dari beberapa jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi menurut Sugiyono, dapat dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Way Lunik yang berkaitan langsung dengan penggunaan elemen *smart village* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Populasi

No	Keterangan	Jumlah
1	Tim <i>Smart Village</i>	5
2	Pemerintahan Desa	9
3	Masyarakat	325
Total		339

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022)

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel bisa dikatakan pula sebagai bagian atau wakil dari populasi yang mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan.

Metode pengambilan sampel acak terstratifikasi adalah metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata tersebut dan dibuat perkiraan untuk mewakili strata yang bersangkutan. Perkiraan secara menyeluruh (*over all estimation*) diperoleh secara gabungan. Apabila anggota-anggota populasi tidak bersifat homogen tetapi bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen, maka proses pengambilan sampelnya akan menimbulkan bias karena keheterogenan yang terdapat dalam anggota populasi sehingga berpengaruh terhadap informasi yang diperoleh dari variabel yang diteliti (Nurhayati, 2008).

Stratified random sampling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 1) Sampel Terstratifikasi Proporsional (*Proportionate Stratified Sampling*), merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen (Strata). Dari masing-masing kelompok diambil sampel secara proporsional, dan Ciri dari kelompok sampel : homogen pada satu kelompok, namun sangat berbeda antar kelompok (varian besar). 2) Sampel Terstratifikasi Tidak Proporsional (*Disproportionate Stratified Sampling*) Merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen (Strata). Dari masing-masing kelompok diambil sampel namun tidak proporsional (Nurhayati, 2008).

Langkah - langkah penarikan sampel dalam metode *Stratified Random Sampling* adalah sebagai berikut : 1) Tentukan dasar stratifikasi (strata), 2) Tempatkan setiap anggota dalam populasi pada strata yang sesuai, 3) Tentukan ukuran

sampel (n), 4) Tentukan jumlah sampel yang harus diambil dari setiap strata, 5) Lakukan pengambilan sampel dari setiap strata dengan metode *Simple Random Sampling* (Nurhayati, 2008).

Sampel yang diambil dari setiap kelompok dihitung dengan rumus berikut (Sugiyono, 2010):

$$n = \frac{\text{Populasi kelompok (stratum)}}{\text{Jumlah Populasi Keseluruhan}} \times \text{jumlah sampel yang ditentukan}$$

n_i : Jumlah strata

n : Jumlah sampel

N_i : Jumlah anggota strata

N : Jumlah anggota populasi seluruhnya

Maka jumlah anggota sampel : 15%

$$\text{Kelompok tim } \textit{smart village} \frac{5}{339} \times 51 = 0,75 \text{ (dibulatkan 1)}$$

$$\text{Kelompok pemerintahan desa} \frac{9}{339} \times 51 = 1$$

$$\text{Kelompok masyarakat} \frac{325}{339} \times 51 = 48$$

$$\text{Sehingga } n_i = 1+1+48= 50$$

Pengambilan sampelnya adalah 1 sampel kelompok tim *smart village*, 1 sampel kelompok pemerintahan desa, dan 48 sampel kelompok masyarakat secara *simple random sampling* karena populasi sudah homogen.

Kemudian untuk pendeskripsian dilakukan menggunakan teknik persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = *Number of casses* (Jumlah Frekuensi / banyaknya individu)

F = Angka *persentase*

Untuk menentukan tinggi rendahnya pembangunan SDM berbasis progam *smart village* di Desa Way Lunik dalam memberikan interpretasi hasil pengolahan data yang berupa angka-angka dapat digunakan pedoman sebagai berikut (Anas Sudijono, 2008: 29 dan 76) :

76% - 100% = tinggi

36% - 75% = sedang

0% - 35% = rendah

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Kuesioner

Merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh peneliti kepada responden yang dianggap mampu dan mewakili dari apa yang ingin diketahui peneliti terhadap obyek yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan sifatnya tertutup karena jawaban telah disediakan dalam bentuk pilihan dan responden hanya memilih jawaban yang sesuai dengan keadaannya. Menurut Sugiyono (2012:142) bahwa kuesioner sangat efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

2) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai

kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah rekaman gadget dan catatan terkait dengan topik penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

1. Editing Data

Editing ialah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil *interview* yang disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahap ini data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui tabel atau narasi selanjutnya di interpretasikan sehingga bisa ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan oleh peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menyebabkan kesan yang bisa merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan secara lengkap pada lampiran. Lampiran pada penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya setelah melaksanakan reduksi adalah penyajian data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:341) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah teks naratif. Bentuk penyajian data kualitatif adalah uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Bila hipotesis yang dirumuskan didukung oleh data yang dikumpulkan di lapangan maka hipotesis tersebut dianggap terbukti dan akan dikembangkan menjadi teori *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan dengan cara induktif, yang mengacu pada data-data yang ditemukan di lapangan, kemudian akan diuji melalui pengumpulan data terus menerus.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi dalam Pembangunan SDM Berbasis Program *Smart Village* (Studi di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara) menunjukkan pada taraf 87,56 yang berarti bahwa Dinas PMDT sudah berperan dalam elemen *smart village* dengan kategori “tinggi” atau berada pada rentang 76%-100% akan tetapi terdapat satu elemen yang belum maksimal sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada elemen *smart government* ini peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik sudah di implementasikan sesuai dengan fungsinya yaitu tercipta sebuah sinkronisasi antara efektif dan efisiensi kerja aparat pemerintah, tersedianya wadah aspirasi masyarakat akan keterlibatannya terhadap partisipasi masyarakat, keterlibatan layanan publik dan sosial, serta transparansi tata kelola yang baik sehingga dapat dikatakan telah berperan.
- b. Pada elemen *smart community* ini peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam mewujudkan komunitas aparatur dan masyarakat desa yang cerdas belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan fungsinya untuk memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam menggunakan teknologi karena terdapat kelompok aparatur maupun masyarakat yang belum mampu membuat aplikasi untuk mengembangkan pembangunan potensi desa sehingga hal ini dikatakan kurang berperan.

- c. Pada elemen *smart environment* ini peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam mewujudkan lingkungan yang cerdas sudah di implementasikan sesuai dengan fungsinya mengubah besar kondisi wilayah sebagai pengoptimalan potensi desa dengan keterlibatannya terhadap pemanfaatan TIK untuk melestarikan lingkungan, serta memelihara nilai adat dan budaya di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan telah berperan dalam menerapkan program *smart village*.

5.2 Saran

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi dalam mengimplementasikan pelayanan kepada pemerintahan Desa Way Lunik sudah berjalan dengan baik akan tetapi harus lebih ditingkatkan pelayanan umumnya agar dapat membangun kemampuan pemerintahan desa di bidang sumber daya manusia.
- b. Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi diharapkan bisa memberikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang mendalam kepada aparatur pemerintahan desa di Desa Way Lunik sebagai peningkatan pembangunan SDM berbasis *smart village*.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi sudah peka dalam menjalankan perannya untuk membangun lingkungan yang cerdas di Desa Way Lunik sesuai dengan tupoksinya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga adat dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Hakim, (2004) *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII).
- Abdullah, Faisal. (2009). *Jalan Terjal Good Governance Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum*. Makassar: Pukap-Indonesia.
- A.Suhaenah Suparno. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. (2003). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Creswell, J. (2018). *30 Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dapla, N., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Debula Kecamatan Kwelamdua Kabupaten Yahukimo). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- H.A.S. Moenir. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indoensia*. Jakarta.PT: Bumi Akasara.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. (1999). *Sosiologi Edisi Keenam Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Leibo Jefta. (1995). *Sosiologi Pedesaan (Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moch. Solekhan. (2012). *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, Setara, Malang.

- Martin, E.1999. *Managing Information Technology What Managers Need to Know*. 3rd ed. New Jersey:Pearson Education International.
- Peursen, van. (1988). *Strategi Kebudayaan*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sutarno, NS. (2005). *Perpustakaan dan masyarakat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Zamzami, Faiz dkk. (2018). *Audit Internal, Konsep, dan Praktik (Sesuai International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 2013)*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Skripsi :

- Bambang Kurniawan. (2022). *Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Smart Village Di Provinsi Lampung Tahun 2021* (Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Hidayat, Irsyad (2022) *Peran pemerintah desa dalam pengembangan SDM melalui literasi digital: Studi deskriptif di Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kamal Maulana, G., Widyastuti, N. W., & Witantra, A. P. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Kampung Marketer Untuk Mengembangkan SDM Digital Marcom Di Purbalingga* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).

Jurnal:

- Afifah, V. N. (2021). *TA: Identifikasi Potensi Pengembangan Konsep Smart Village Pada Desa Wisata Rende Kabupaten Bandung Barat* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).
- Amerieska, S., Djajanto, L., Rahayu, S., Afandi, A., Kusuma, A., Melani, E., ... & Rizza, M. A. (2022, September). Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis Smart

- Village Pada Desa Wringinsongo: Human Resources Capacity Based On Smart Village In Wringinsongo Village. In *SENTIMAS: Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, Pp. 534-541).
- Anas. Sudijono. (2008). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 29 dan 76.
- Aziz, A. (2022). Penggunaan Media Sosial Sebagai Upaya Pembangunan SDM Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 3(2), 25-28.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahapan Pengembangan Smart Kampung Di Desa Ketepang Kabupaten Banyuwangi, 68-80.
- Eniyati, S., Candra, R., & Retnowati, M. S., & AP, KM (2017). *Perhitungan Tiingkat Kesiapan Implementasi Smart City Dalam Perspektif SMart Governance dengan Metode Fis Mamdani*, 39-48.
- Fatimah, Siti. (2012). Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Ektp di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Uin Suska Riau, Pekanbaru.
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital Dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220-234.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia (Developing The Smart Village Concept For Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 63-86.
- Hermayanti, E. S., & Yuwono, T. (2020). Implementasi Green Smart Village Di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal Of Politic And Government Studies*, 9(02), 121-130.
- Iswanto, D. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah Desa Dalam Membangun Smart Village Governance (Studi Di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*, 2(1), 101-108.

- Maulana, F., Affandi, M. I., & Setianingrum, L. (2017). Penyebab Perbedaan Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Terhadap Desa Pintar (Studi Kasus Desa Hanura).
- Maulana, S., Kagungan, D., & Prihantika, I. (2022). Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Administrativa*, 4(1), 101-113.
- Nurhayati. (2008). “Studi Perbandingan Metode Sampling Antara Simple Random dengan Stratified Random”, *Jurnal Basic Data, ICT Research UNAS*, Vol.3, No.1,
- Premana, A., Sucipto, H., & Widiatoro, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Tegaloreja). *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1), 43-54.
- Prawirosentono, Suryadi. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia : Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta : BPFE.
- Pendit, Putu Laxman. (2005) *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu pengantar Diskusi Epistemologi dan Metodologi*, Jakarta: JIP-FSUI, hal 195.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12-19.
- Ramadan, E. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkalkabupaten Kutai Timur.
- Rizal, C., Supiyandi, S., & Zen, M. (2021). Membangun Sumber Daya Manusia Dengan Memanfaatkan Komputer Di Masa Pandemi Covid-19. *Kommas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 81-85.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63-67.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal Of Public Administration And Local Governance*, 3(1), 18-28.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. (2012). “Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung : ALFABETA.

Thoha, Miftah, 2001, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zufri, A. K. (2022). Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Dinamika*, 29(1), 6085-6097.

Undang-Undang :

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung

Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung 2020

Surat Keputusan Gubernur Nomor:G/7/V.12/HK/2021 Provinsi Lampung Tentang Pelaksanaan program berbasis *smart village*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Website:

<https://waylunik.id/>